



Jarak Zonasi PPDB Dikaji

UMBULHARJO (MERAPI) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 tidak lagi menerapkan zonasi menjadi satu tingkat Kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tengah mengkaji penentuan zonasi, seperti melihat jarak ke sekolah.

"PPDB berbasis zona ini telah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PPDB sebelumnya kami terapkan zonasi tingkat kota. PPDB nanti kami kaji berbasis jarak. Bisa juga berbasis jarak UPT dan rayonisasi," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, Senin (15/1).

Dia menuturkan, penentuan zonasi PPDB yang dikaji mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari zonasi dalam kota dan luar kota, rayonisasi sampai melihat jarak pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sekolah seperti di SD dan jarak manual tempat tinggal calon siswa ke sekolah. Selain itu pengukuran jarak perjalanan bisa melalui *google map* dan jarak udara dengan menarik garis lurus dari rumah calon siswa ke sekolah.

Alamat didasarkan dalam kartu keluarga (KK) yang minimal sudah berlaku 6 bulan tinggal di Kota Yogyakarta sebelum PPDB.

"Pada kajian awal kami cenderung melihat

pengukuran jarak udara. Tapi ini masih dikaji. Belum diputuskan," ujarnya.

Untuk kuota dalam zona sebanyak 90 persen dan sisanya untuk luar zona 5 persen dan jalur khusus 5 persen. Jalur khusus itu bagi anak guru, karyawan sekolah setempat serta anak pejabat negara yang dinasnya selalu berpindah. Menurutnya sistem zonasi PPDB di Kota Yogyakarta tidak mudah karena SMP negeri tidak merata di seluruh wilayah. Misalnya dilihat dari wilayah kecamatan, ada 3 kecamatan di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki SMP negeri seperti di Pakualaman, Mergangsan dan Ngampilan. "Untuk SD negeri seleksi pertama melihat dari usia, baru mempertimbangkan zonasi jarak. Untuk SMP negeri seleksi melihat zonasi jarak ke sekolah. Kalau dari jarak ada yang sama, baru melihat nilai hasil UASDA," papar Edy.

Ditambahkan sistem zonasi tersebut berlaku secara nasional untuk pemerataan kualitas pendidikan. Berkaca pada tahun lalu, lanjutnya, banyak daerah yang memiliki persepsi sendiri-sendiri terkait sistem zonasi. Namun PPDB nanti semua daerah sudah dikumpulkan oleh Kemendikbud dan harus diseragamkan persepsi zonasi. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005